KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : DPR: Evaluasi Manajemen Keselamatan Gedung Publik
**Tanggal** : Jumat, 12 Desember 2025
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 5

## Gedung Terbakar Renggut 22 Nyawa

# DPR: Evaluasi Manajemen Keselamatan Gedung Publik

**Senayan menyesalkan terjadinya kebakaran di gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang. Hal ini menunjukkan buruknya tata kelola keselamatan gedung dan bangunan umum di Indonesia.**


SUMBER: WEB PKB

Syaiful Huda

WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda meminta agar pengelola gedung tersebut diperiksa dan dibawa ke ranah hukum jika ada unsur pelanggaran pidana. Sebab selama ini sering terjadi pelanggaran manajemen keselamatan gedung.

"Seharusnya setiap pengelola gedung harus memiliki perencanaan proteksi kebakaran, pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan latihan evakuasi," ujar Huda dalam keterangannya, Kamis (11/12/2024).

Diketahui, kebakaran gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, terjadi pukul 12.43 WIB, Selasa (9/12). Api diduga berasal dari ledakan baterai drone di lantai satu yang berfungsi sebagai area gudang.

Sumber api muncul dari tumpukan baterai yang tersimpan dan dengan cepat membesar karena material mudah terbakar di area tersebut. Total korban meninggal dunia dari kejadian kebakaran ini berjumlah 22 orang. Rinciannya, 15 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Salah satu korban merupakan ibu hamil.

Huda melanjutkan, jumlah korban meninggal dunia yang mencapai 22 orang bukan jumlah yang sedikit. Sebab itu semua nyawa manusia yang mempunyai sanak keluarga. "Semoga peristiwa serupa tak terulang kembali ke depannya," harap dia.

Kegagalan manajemen keselamatan, lanjutnya, bisa berakibat langsung pada jatuhnya korban jiwa atau cacat yang merugikan banyak orang. Kasus seperti ini terus terjadi berulang kali tanpa tindakan perubahan yang berarti.

"Banyak kasus bangunan yang digunakan untuk aktivitas publik baik perkantoran, sekolah, maupun tempat ibadah dibiarkan tanpa pengawasan berarti," keluh politikus PKB ini.

Untuk itu, Huda mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) mengevaluasi manajemen keselamatan gedung publik di Indonesia. Karena seyogyanya setiap gedung harus memenuhi syarat keselamatan.

Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 14/PRT/2017, gedung untuk aktivitas publik harus memenuhi sejumlah persyaratan. Antara lain; jumlah pintu, lebar pintu, sirkulasi, arah bukaan pintu dan jendela, hingga jumlah akses gedung umum.

Selain itu, Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2008 juga mengatur gedung umum harus memiliki sistem proteksi kebakaran mulai dari alarm, detektor, alat pemadam api ringan (APAR), hidran, hingga jalur evakuasi. "Kemen PU tidak boleh hanya mengawasi di awal tetapi lalai dalam tahap pemeriksaan secara berkala tentang manajemen keselamatan gedung umum di Indonesia," tegasnya.

Huda mengatakan, ada dugaan pelanggaran manajemen keselamatan yang dilakukan pengelola gedung Terra Drone. Buktinya, gedung enam lantai hanya memiliki satu pintu akses keluar-masuk. Meskipun ada data jika gedung tersebut mengantongi surat laik fungsi (SLF), namun faktanya akses untuk keluar masuk hanya ada satu.

"Situasi ini memicu *bottle neck* atau leher botol dalam proses penyelamatan diri para korban sehingga banyak dari mereka yang harus tewas," kata legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas menambahkan, aparat kudu memastikan apakah ada unsur kelalaian yang berkontribusi pada tingginya jumlah korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Jika terbukti ada unsur pidana, pelaku harus diberi sanksi tegas.

"Kami meminta aparat kepolisian mengusut tuntas penyebab kebakaran, termasuk mendalami apakah ada unsur kelalaian," ujar Hasbi dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Hasbi meminta kepolisian memeriksa kepatuhan gedung terhadap persyaratan proteksi kebakaran sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Sistem tersebut mencakup peralatan, sarana, dan pengelolaan proteksi aktif maupun pasif.

Pemerintah dan aparat kepolisian, lanjutnya, perlu memastikan apakah gedung dan perkantoran di Jakarta telah memenuhi standar proteksi kebakaran. Apalagi pada awal 2025 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat terdapat 694 gedung bertingkat yang belum memenuhi syarat proteksi kebakaran.

Sehingga, pendataan ulang dilakukan untuk memastikan pemenuhan standar keselamatan. "Gedung mana yang sudah memenuhi standar, mana yang belum. Jangan sampai tragedi seperti ini terulang lagi," kata dia mengingatkan.

Bagaimana tanggapan kepolisian? Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) Roby Saputra mengatakan, pihaknya telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Terra Drone Indonesia berinisial MW sebagai tersangka dalam kasus kebakaran gedung Terra Drone.

MW dijerat dengan Pasal 187 KUHP tentang perbuatan sengaja mengakibatkan kebakaran, Pasal 188 KUHP tentang kelalaian menyebabkan kebakaran dan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian menyebabkan kematian. "Betul (Dirut PT Terra Drone ditetapkan sebagai tersangka). Kemarin," kata Roby di Jakarta, Kamis (11/12/2025). ■ TIF